

Metode Peningkatan Mutu di Era Otonomi Pendidikan

Susi Lawati

Departemen Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang

*E-mail: susilawathy24@gmail.com

Abstract

Pada dasarnya otonomi juga berarti mampu untuk menentukan sendiri keinginan dan kebutuhannya sendiri yang dipandang sesuai dengan keberadaannya selaku insan atau instansi yang bebas mengatur dirinya sendiri. Pengertian otonomi bersifat multidimensional, artinya otonomi berlaku dalam berbagai aspek kebutuhan dan sektor kehidupan antara lain: kebutuhan individu atau berkeluarga dalam menentukan lokasi tempat kediaman, menentukan jenis makanan, Tujuan artikel ini adalah untuk memberikan wawasan atau pandangan kepada pembaca, pemerhati, akademisi, dan praktisi pendidikan untuk memahami bagaimana mencari solusi terbaik dalam mengembangkan mutu pendidikan di era otonomi daerah dan otonomi pendidikan melalui penerapan prinsip manajemen. yaitu: tata kelola yang baik, efisiensi internal dan eksternal pendidikan. Melalui penerapan tiga pendekatan tersebut, diharapkan: (1) peningkatan kapasitas kelembagaan dan seluruh program di bidang pendidikan dapat dilaksanakan, (2) pengembangan mutu pendidikan melalui input, proses, dan output berbasis otonomi. Daerah, (3) manfaat dan dampak hasil pembangunan pendidikan dasar terhadap otonomi daerah. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan. Berbagai sumber dianalisis untuk memperoleh simpulan dari penelitian ini. Upaya peningkatan untuk mencapai pendidikan bermutu tidak hanya memenuhi aspek input dan output, tetapi yang lebih penting adalah aspek proses, yang dimaksud adalah pengambilan keputusan, manajemen program, proses manajemen kelembagaan, proses belajar mengajar dan proses monitoring dan evaluasi dengan catatan proses belajar mengajar memiliki tingkat kepentingan paling tinggi dibandingkan dengan proses lainnya.

Keywords: Strategi, Mutu, Otonomi Pendidikan, Peningkatan Mutu Pendidikan



Licensees may copy, distribute, display and perform the work and make derivative works and remixes based on it only if they give the author or licensor the credits ([attribution](#)) in the manner specified by these. Licensees may copy, distribute, display, and perform the work and make derivative works and remixes based on it only for [non-commercial](#) purposes.

Pendahuluan

Undang-undang No. 22 tahun 1999 mengatur tentang pemberian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam wujud otonomi daerah. Pada pasal 11 UU no. 22 tahun 1999 mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan yaitu pekerjaan umum, kesehatan, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertambangan, koperasi, tenaga kerja serta pendidikan dan kebudayaan.

Peningkatan mutu pendidikan selama ini belum sesuai dengan harapan karena disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah strategi pembangunan pendidikan yang lebih bersifat “input oriented” dan bersifat “macro oriented” yang cenderung diatur oleh birokrasi ditingkat pusat. Institusi pendidikan masih mengandalkan pola manajemen lama yang dianggap kurang efektif dan efisien sehingga hasilnya kurang maksimal, seharusnya dikembangkan pola manajemen pada kepuasan konsumen, ialah bahwa mutu pendidikan dapat ditingkatkan melalui penerapan manajemen mutu atau total quality management (Arcaro, 2001). Untuk meningkatkan kualitas

pendidikan di setiap daerah melalui otonomi pendidikan dengan pendekatan yang jelas, terarah, serta berhasil guna, maka diperlukan penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam otonomi pendidikan.

Seperti yang kita tahu bahwa dalam Peningkatan mutu pendidikan selama ini belum sesuai dengan harapan karena disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah strategi pembangunan pendidikan yang lebih bersifat “input oriented” dan bersifat “macro oriented” yang cenderung diatur oleh birokrasi ditingkat pusat. Institusi pendidikan masih mengandalkan pola manajemen lama yang dianggap kurang efektif dan efisien sehingga hasilnya kurang maksimal, seharusnya dikembangkan pola manajemen pada kepuasan pelanggan, artinya bahwa mutu pendidikan dapat ditingkatkan melalui penerapan manajemen mutu atau total quality management (Darmaningtyas, 2004).

Pendidikan merupakan sektor penting yang berperan dalam kebangkitan suatu bangsa dan negara. Oleh karena itu, pengelolaannya harus terkelola dengan baik. Pendidikan di Indonesia memang sudah berjalan dan terkelola, namun pengelolaannya berlangsung kurang maksimal. salah satu bentuk koeksi dari corak pemerintah dalam menjalankan segala aktivitasnya dan juga hubungan antara pusat daerah yang terpusat atau lebih dikenal sentralistik, ksploitatif serta sangat jauh dari nilai-nilai demokrasi karna seperti yang kita tahu bahwa yang lebih berkuasa di indonesia adalah politiknya dan yang mempunyai peran yang lebih penting juga adalah orang dari penguasa tertinggi maka tidak adanya demokrasi yang mngikuti semua khalayak ramai dariberbagai kalangan.

Seperti yang kita tahu bahwa pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam membentuk setiap pribadi pada manusia agar dapat mengembangkan ilmunya seuai dengan perkembangan zaman pada saat skarang ini. untuk itu kita perlu penddikan yang bermutu dalam menunjang pendidikan dalam era yang lebih berkembang dan juga diharapkan agar pendidikan yang bermutu ini juga bisa di nikmati oleh seluruh khalayak ramai bukan hanya golongan tertentu saja tapi semuanya (Baihaqi, 2018). Kebijakan pendidikan di Indonesia seharusnya mendukung terlaksananya hak- hak manusia terutama sekali hak dalam memperoleh pendidikan dan dalam mmpereoleh pendidikan yang bermutu harus disesuaikan dengan konteks otonomi daerah Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi.

Metode

Pendekatan berdasar pada kajian tentang Metode Peningkatan Mutu di Era Otonomi Pendidikan. Pengembangan interpersonal dan kelompok digunakan sebagai alat analisis dalam tulisan ini. Tulisan ini merupakan tulisan gagasan berbasis pada tahapan studi kepustakaan. Studi kepustakaan yang dilakukan yaitu studi yang objek penelitiannya berupa karya-karya kepustakaan, baik berupa buku, artikel pada jurnal ilmiah dan jurnal populer dalam media massa. Studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan situasi yang diteliti. Sumber-sumber kepustakaan ini kemudian menjelaskan tentang Metode Peningkatan Mutu di Era Otonomi Pendidikan

Hasil dan Pembahasan

Pada dasarnya otonomi juga berarti mampu untuk menentukan sendiri keinginan dan kebutuhannya sendiri yang dipandang sesuai dengan keberadaannya selaku insan atau instansi yang bebas mengatur dirinya sendiri. Pengertian otonomi bersifat multidimensional, artinya otonomi berlaku dalam berbagai aspek kebutuhan dan sektor kehidupan antara lain: kebutuhan individu atau berkeluarga dalam menentukan lokasi tempat kediaman, menentukan jenis makanan, mencari dan menentukan jodoh, menentukan bentuk dan lokasi rumah tinggal, melakukan perjalanan dari satu tempat ketempat lain dan yang lebih penting lagi otonomi dalam menentukan bentuk jenis dan jenjang pendidikan. Dengan demikian yang dimaksud dengan otonomi pendidikan adalah bagaimana setiap daerah dapat mengelolah pendidikan sesuai keinginan dan kemampuannya.

Definisi mutu dapat diartikan dari dua sisi, yaitu segi normatif dan segi deskriptif. Dalam arti normatif, mutu ditentukan berdasarkan pertimbangan intrinsik dan ekstrinsik. Menurut kriteria intrinsik, mutu pendidikan merupakan produk pendidikan yakni manusia yang terdidik sesuai standar ideal. Sedangkan berdasarkan kriteria ekstrinsik, pendidikan merupakan instrumen untuk mendidik tenaga kerja yang terlatih (Sabandi, 2013). Sebagaimana dalam arti deskriptif, mutu ditentukan berdasarkan keadaan senyatanya misalnya hasil tes prestasi belajar. Dengan demikian, mutu pendidikan adalah derajat keunggulan dalam pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien untuk melahirkan keunggulan akademis dan ekstra kurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan pembelajaran tertentu.

Komponen yang terkait dengan mutu pendidikan adalah pertama, kesiapan dan motivasi siswa. Kedua, kemampuan guru profesional dan kerjasama dalam organisasi sekolah. Ketiga, kurikulum meliputi relevansi isi dan operasional proses pembelajarannya (M Fadhli, 2017). Keempat, sarana dan prasarana meliputi kecukupan dan keefektifan dalam mendukung proses pembelajaran. Kelima, partisipasi masyarakat (orang tua, pengguna lulusan dan perguruan tinggi) dalam pengembangan programprogram pendidikan sekolah.

1. Pendekatan Mutu Pendidikan

Pendekatan perlu diperhatikan dalam peningkatan mutu pendidikan ialah pertama, perbaikan secara terus-menerus (*continuous improvement*). Konsep ini mengandung arti bahwa pihak pengelola senantiasa melakukan berbagai perbaikan dan peningkatan secara terusmenerus untuk menjamin semua komponen penyelenggara pendidikan telah mencapai standar mutu yang telah ditetapkan (Fathurrohman, 2016). Konsep ini senantiasa memperbaharui proses pendidikan berdasarkan kebutuhan dan tuntutan pelanggan. Jika tuntutan dan kebutuhan konsumen berubah, maka pihak pengelola institusi pendidikan dengan sendirinya akan merubah mutu, serta selalu memperbaharui komponen produksi atau komponen-komponen yang ada dalam institusi pendidikan.

Kedua, menentukan standar mutu (*quality assurance*). Paham ini dipakai untuk menetapkan standar-standar mutu dari semua komponen yang bekerja dalam proses produksi atau transformasi lulusan institusi pendidikan. Standar mutu pendidikan misalnya dapat berupa pemilihan atau akuisisi kemampuan dasar pada masing-masing bidang pembelajaran, dan sesuai jenjang pendidikan yang ditempuh (Chourmain, 2007). Standar mutu proses pembelajaran harus pula ditetapkan, dalam arti bahwa pihak manajemen perlu menetapkan standar mutu proses pembelajaran yang diharapkan dapat berdaya guna untuk mengoptimalkan proses produksi dan untuk melahirkan produk yang sama, ialah yang menguasai standar mutu pendidikan berupa penguasaan standar kemampuan dasar (Kompri, 2015). Pembelajaran yang dimaksud sekurangkurangnya memenuhi karakteristik; menggunakan pendekatan pembelajaran pelajar aktif (*student active learning*), pembelajaran kooperatif dan kolaboratif, pembelajaran konstruktif, dan pembelajaran tuntas (*master learning*).

Ketiga, perubahan Kultur (*change of culture*). Konsep ini bertujuan membentuk budaya organisasi yang menghargai mutu dan menjadikan mutu sebagai orientasi semua komponen organisasi. Jika manajemen ini ditetapkan di institusi pendidikan, maka pihak pimpinan harus berusaha membangun kesadaran para anggotanya, mulai dari pemimpin, staf, guru, siswa, dan berbagai unsur terkait, seperti pemimpin yayasan, orang tua, dan para pengguna lulusan pendidikan akan pentingnya mempertahankan dan meningkatkan mutu pembelajaran, baik mutu hasil maupun proses pembelajaran (Mansur, 2012).

Keempat, perubahan organisasi (*upsidedown organization*). Jika visi dan misi, serta tujuan organisasi sudah berubah atau mengalami perkembangan, maka sangat dimungkinkan terjadinya perubahan organisasi. Perubahan organisasi ini bukan berarti perubahan wadah organisasi, melainkan sistem atau struktur organisasi yang melambangkan hubungan-hubungan kerja struktur organisasi dan pengawasan dalam organisasi. Perubahan ini

menyangkut perubahan kewenangan, tugas-tugas dan tanggung jawab. Misalnya, dalam kerangka manajemen berbasis sekolah, struktur organisasi dapat berubah terbalik dibandingkan struktur konvensional (Musanna, 2010). Jika dalam struktur konvensional berturut-turut dari atas ke bawah; senior manager, middle manager, teacher dan support staff; sedangkan struktur yang baru, berupa struktur organisasi layanan dari atas kebawah berturut-turut; learner, team, teacher and support, staff, dan leader.

Kelima, mempertahankan hubungan dengan pelanggan (*keeping close to the customer*). Karena organisasi pendidikan menghendaki kepuasan pelanggan, maka perlunya mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan menjadi sangat penting. Dan inilah yang dikembangkan dalam unit public relations. Berbagai informasi antara organisasi pendidikan dan pelanggan harus terus-menerus dipertukarkan, agar institusi pendidikan senantiasa dapat melakukan perubahan-perubahan atau improvisasi yang diperlukan, terutama berdasarkan perubahan sifat dan pola tuntutan serta kebutuhan pelanggan. Bukan hanya itu, pelanggan juga diperkenankan melakukan kunjungan, pengamatan, penilaian dan pemberian masukan kepada institusi pendidikan (Maswan, 2015). Semua masukan itu selanjutnya akan diolah dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan mutu proses dan hasil-hasil pembelajaran. Dan yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam manajemen berbasis sekolah, guru dan staf justru dipandang sebagai pelanggan internal, sedangkan pelajar, termasuk orang tua pelajar dan masyarakat umum, termasuk pelanggan eksternal. Maka, konsumen baik internal maupun eksternal harus dapat terpusatkan melalui interval kretait pimpinan institusi pendidikan (Mulyasa, 2012).

2. Penerapan Prinsip Good Governance

Prinsip-prinsip asuhan/bimbingan /penyuluhan yang baik dan benar (*good governance*) dapat diterapkan melalui beberapa hal: (a) Akuntabilitas (adanya rasa tanggung jawab); (b) Keterbukaan (transparan); (c) Membuka peran serta semua pihak (partisipasi); (d) Kesederajatan/ kesetaraan (equality); (e) Kepekaan/kesegaran merespon terhadap semua tuntutan pelayanan/pelaksanaan yang wajib dan rasional; (f) Penataan/pelaksanaan hukum (rule of law); (g) Efisiensi dan efektifitas dalam menentukan setiap pekerjaan; (h) Visi strategic/memandang haug ke depan dalam hal-hal yang paling strategic dan menentukan.

Dengan pemberlakuan prinsip-prinsip *good governance* dalam melaksanakan upaya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan juga otonomi pendidikan, maka diharapkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja manajemen otonomi pendidikan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan (Kusnandi, 2017).

Dalam konteks penyelenggaraan otonomi pendidikan juga harus diupayakan agar seluruh jajaran yang berkiprah dan mengabdikan di dunia pendidikan ikut serta melaksanakan prinsip-prinsip tersebut sebagai kaidah normative yang harus secara sadar dan tanpa pamrih mampu melaksanakannya. Secara tidak langsung prinsip-prinsip pemberdayaan dan peningkatan kapasitas tersebut termasuk prinsip-prinsip "*good governance*" yang juga menjadi pedoman kerja dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas disektor pendidikan khususnya manajemen otonomi pendidikan (Engkoswara & Aan Komariah, 2010). Secara wajar hal-hal tersebut juga dengan sendirinya berlaku bagi seluruh aparatur pendidikan (kepala sekolah, wali kelas, guru, guru pembimbing, dan penyuluh pendidikan, penilik dan pengawas pendidikan, dinas pendidikan) yang melaksanakan manajemen otonomi pendidikan di semua wilayah dan dimanapun lembaga itu berada.

Dalam realitas pelaksanaan otonomi pendidikan program inti dari upaya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas pada hakikatnya juga upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan pada semua bentuk, jenjang, dan jenis pendidikan (Saifulloh, 2012). Kepedulian pada peningkatan mutu pendidikan menjadi keharusan bagi setiap daerah di

seluruh Republik Indonesia. Selama hampir empat dasa warsa sejak tahun 1960 memang secara kuantitatif pendidikan di Indonesia sudah berkembang.

Data menunjukkan peningkatan jumlah-jumlah lembaga pendidikan dasar menengah, dan tinggi secara signifikan. Namun peningkatan jumlah tersebut tidak disertai peningkatan mutu pendidikan (Shobri, 2017). Oleh karena itu wajar bila desentralisasi dan otonomi pemerintahan berikut penyelenggaraan otonomi pendidikan juga membawa misi dan tugas untuk meningkatkan mutu pendidikan.

3. Penerapan Aspek Efisiensi Internal Pendidikan

Pendidikan Upaya untuk meningkatkan efisiensi internal pendidikan mengharuskan para manajer otonomi pendidikan memfokuskan perhatiannya pada tiga hal: (a) Faktor input Pendidikan; b) Faktor proses Pendidikan; c) Faktor output Pendidikan.

Dari ketiga faktor efisiensi internal pendidikan tersebut maka faktor-faktor tersebut yang meliputi Unsur-unsur sebagai berikut: (a) Unsur SDM berupa jumlah dan mutu guru, pelatih, instruktur dan semua orang yang berfungsi sebagai fasilitator Pendidikan; (b) Unsur mutu dan peran serta stake holders pendidikan (peserta didik, siswa, orang tua, serta masyarakat; (c) Unsur pendanaan/pembiayaan pendidikan yang memungkinkan semua program pendidikan di lembaga pendidikan/sekolah dapat berlangsung; (d) Unsur prasarana dan sarana (tanah, bangunan gedung, perpustakaan sekolah, laboratorium, pusat sumber belajar); (e) Unsur teknologi yang diterapkan dan deprogram serta dimiliki oleh lembaga pendidikan seperti: sarana computer, media pembelajaran, orientasi guru terhadap penerapan teknologi; (f) Unsur kurikulum/program pendidikan berikut seluruh agenda dan program pendidikan dan pembelajaran yang diberlakukan di lembaga Pendidikan; (g) Unsur lingkungan lembaga pendidikan baik lingkungan alam (gunung, bukit, lembah, pantai pedalaman, hutan, persawahan, pertambakan; (h) Unsur reputasi dan prestasi lembaga pendidikan yang memicu dan mendorong semangat belajar para siswa dan masyarakat sekitarnya; (i) Unsur waktu belajar dan pembelajaran yang sesuai dengan rancangan kurikulum dan agenda/program pembelajaran.

Unsur input ini sangat menentukan bagi kelangsungan faktor berikutnya yaitu faktor proses pendidikan (belajar dan pembelajaran) yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut: (a) Unsur model pendekatan dan metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru dan lembaga pendidikan yang bersangkutan; (b) Unsur pendayagunaan waktu tersedia secara efisiensi dan efektif; (c) Unsur orientasi dan wawasan belajar dan pembelajaran yang disosialisasikan di kelas dan dalam forum belajar mengajar; (d) Unsur pendayagunaan kurikulum dan ekstra kurikulum di dalam dan di luar proses belajar mengajar; (e) Unsur paradigma baru yang diterapkan dalam pendekatan belajar dalam arti belajar yang lebih inovatif, kreatif, adaptif, dan generik.

Faktor input dan proses akan menentukan faktor output yang juga meliputi unsur-unsur sebagai berikut: (a) Tepat waktu atau lebih cepat dari waktu program belajar dan pembelajaran yang ditetapkan; (b) Hasil pendidikan dan lulusan siap kerja melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya; (c) Para orang tua dan seluruh stake holders pendidikan merasakan hasilnya sesuai yang diharapkan; (d) Para lulusan berhasil mendapatkan predikat kelulusan sesuai tuntutan kompetensi yang ditetapkan dalam tujuan program; (e) Jumlah peserta didik yang tak berhasil sangat minim dibandingkan mereka yang berhasil; (f) Hasil/output pendidikan dicapai dengan biaya yang sesuai dengan norma-norma efisiensi, efektifitas, dan produktifitas.

Kesemua hal yang diuraikan di atas adalah merupakan pembahasan tentang efisiensi internal pendidikan.

4. Penerapan Aspek Efisiensi Eksternal Pendidikan

Aspek ini juga sangat menentukan pencapaian mutu pendidikan yang meliputi faktor-faktor sebagai berikut: (a) Faktor manfaat/kegunaan (benefit) output Pendidikan; (b) Faktor dampak atau pengaruh (impact) hasil Pendidikan.

Faktor manfaat hasil pendidikan terdiri dari beberapa unsur yaitu: (a) Manfaat bagi stake holders pendidikan (peserta didik, orang tua, masyarakat, dunia usaha, pengguna lulusan pendidikan); (b) Manfaat bagi dunia kerja dan pasar kerja dalam memenuhi SDM yang siap pakai, kompeten dan bermutu; (c) Manfaat bagi lembaga pendidikan sebagai bukti pencapaian reputasi yang positif selaku lembaga penghasil SDM yang bermutu; (d) Manfaat bagi daerah/wilayah dengan tersedianya SDM yang lebih terdidik (better well educated human resources)

Faktor dampak hasil lulusan adalah segala bentuk, dampak, pengaruh, dan konsekuensi output lulusan lembaga pendidikan terhadap: (a) Kehidupan sosial masyarakat; b) Kehidupan cultural; (c) Kehidupan ekonomi; (d) Kehidupan politik lokal/nasional; (e) Kehidupan keamanan/ketentraman masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek, faktor-faktor, unsur-unsur, komponen-komponen, pendekatan-pendekatan yang menentukan mutu pendidikan sangat luas, kompleks, dan rumit (Muhammad Fadhli, 2017). Disinilah timbul tantangan yang cukup luas dan kompleks bagi para para pengelola institusi pendidikan untuk menyelenggarakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya bagi peningkatan mutu pendidikan di wilayah masing-masing.

Kesimpulan

Pelatihan Dari beberapa pendekatan yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal yang merupakan upaya yang perlu dilakukan dalam mengelola institusi untuk peningkatan mutu pendidikan di setiap daerah dan wilayah di seluruh Republik Indonesia: Upaya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan yang berpedoman dengan prinsip good governance yang menjadi kaidah yang normative untuk merealisasikan seluruh program desentralisasi dan otonomi daerah khususnya bidang pendidikan. Kemampuan penerapan aspek efisiensi internal pendidikan dengan fokus: input, proses dan output. Kemampuan penerapan aspek eksternal pendidikan dengan memperhatikan faktor manfaat dan dampak dari hasil pendidikan. Kemampuan merealisasikan komponen dan prinsip-prinsip yang terkait dengan peningkatan mutu pendidikan. Upaya memperhatikan pendekatan-pendekatan dalam peningkatan mutu pendidikan.

Daftar Rujukan

- Arcaro, J. (2001). *Pendidikan Berbasis Mutu; Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baihaqi, M. I. (2018). Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Optimalisasi Manajemen Personalia. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 10(1), 49–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/konstruk.v10i1.454>
- Chourmain, I. (2007). *Kompilasi Manajemen Otonomi Pendidikan*. Jakarta: Pasca Serjana Universitas Negeri Jakarta.
- Darmaningtyas, dkk. (2004). *Mengbongkar Ideologi Pendidikan; Jelajah Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional*. Yogyakarta: Ar-Ruzz. Media.
- Engkoswara & Aan Komariah. (2010). *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Fadhli, M. (2017). Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 1(2), 215–240. <https://doi.org/10.29240/jsmp.v1i2.295>

- Fadhli, Muhammad. (2017). Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 1(2), 215–240. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jsmp.v1i2.295>
- Fathurrohman, M. (2016). Pengembangan Budaya Religius dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.21274/taalum.2016.4.1.19-42>
- Kompri. (2015). *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Kusnandi. (2017). Konsep Dasar dan Strategi Penjaminan Mutu Pendidikan: Sebagai Review Kebijakan Mutu Pendidikan. *Journal of Education Management and Administration Review*, 1(2), 107–118.
- Mansur, N. (2012). Urgensi Kurikulum Muatan Lokal dalam Pendidikan. *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*, 13(1), 68–79. <https://doi.org/10.22373/jid.v13i1.465>
- Maswan. (2015). Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah. *Jurnal Tarbawi*, 12(2).
- Mulyasa, E. (2012). *Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Musanna, A. (2010). Revitalisasi Kurikulum Muatan Lokal Untuk Pendidikan Karakter Melalui Evaluasi Responsif. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 16(3). Retrieved from <http://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/%0Aarticle/view/516/355>
- Sabandi, A. (2013). Supervisi pendidikan untuk pengembangan profesionalitas guru berkelanjutan. *Pedagogi Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 13(2), 1–9.
- Saifulloh, dkk. (2012). STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH. *Jurnal Sosial Humaniora*, 5(2), 206–218. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.12962/j24433527.v5i2.619>
- Shobri, M. (2017). Strategi Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 3(1), 11–26.